

ISLAM DAN MASALAH KEMANUSIAAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN PEMBEBASAN

Ah. Choiron

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

ahmadchoiron55@gmail.com

Abstract

ISLAM AND HUMANITY PROBLEMS IN PEDAGOGIC OF FREEDOM PERSPECTIVE. This study is intended to provide an overview of Islam and humanity problems that have recently developed as a result of the era of globalization and the solution of pedagogic of freedom perspective. Mahathir Mohamad said that globalization era becomes the arena of competition in all aspects of human life, whether social, economic, political, cultural, ideological, and defense and security aspects. Therefore, there is often a tendency of great competition and collision between developed and developing countries and even repressions often happen, one of them is the unfairness of rich aristocracy qou status acts abusively against the poor and small groups. For example, the case of dehumanism to the people of Afghanistan, Libya, Iraq, Yemen, Syria and some Muslim countries in Africa is evidence of the loss of justice values. From the beginning, Islam actually condemns the behavior of injustice, Islam is present to defend the oppressed (mustadl'afin) both systematically and sociologically. Asghar Ali Engineer tries to articulate the theology of liberation Islam in education with the aim of defending mustadl'afin groups by giving awareness and equipping them with a very powerful ideological ideology against the oppressors.

Keywords: Islam, Humanity, Liberation, Education.

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan memberikan sebuah gambaran terhadap problematika Islam dan kemanusiaan yang akhir-akhir ini berkembang sebagai akibat dari era globalisasi dan solusinya perspektif pendidikan pembebasan. Dikatakan Mahathir Mohamad bahwa era globalisasi menjadi ajang persaingan dalam segala aspek kehidupan manusia, baik bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, ideologis dan pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, tidak jarang muncul kecenderungan persaingan dan benturan hebat antara negara maju dengan negara-negara berkembang dan bahkan tidak jarang terjadi penindasan, salah satunya adanya ketidakadilan status quo aristokrasi yang kaya bertindak *abusif* terhadap orang miskin dan kelompok-kelompok kecil. Sebagai contoh kasus dehumanisme terhadap rakyat Afghanistan, Libya, Irak, Yaman, Suriah, dan beberapa negara muslim di Afrika menjadi bukti hilangnya nilai-nilai keadilan. Islam sejak awal sebenarnya mengutuk perilaku ketidakadilan, Islam hadir untuk membela kaum tertindas (*mustad'afin*) baik secara sistematis maupun sosiologis. Asghar Ali Engineer berusaha menyuarakan teologi Islam pembebasan dalam pendidikan dengan tujuan membela kelompok *mustad'afin* dengan cara memberikan kesadaran dan membekali mereka dengan ideologi ideologi yang sangat ampuh melawan kelas penindas.

Kata kunci: Islam, Kemanusiaan, Pembebasan, Pendidikan.

A. Pendahuluan

Islam berasal dari kata Arab, *aslama-yuslimu-islaman*, yang berarti menyelamatkan. Ungkapan salam dalam tradisi Islam, *assalamu alaikum*, berarti semoga keselamatan menyertai kalian semuanya. Islam atau Islamian adalah *masdar* (kata benda) sebagai bahasa penunjuk dari *fi'il* (kata kerja), yaitu *aslama* yang bermakna telah selamat (masa lampau) dan *yuslimu* bermakna menyelamatkan (*past continuous tense*). Kata triliteral semitik *s-l-m* menurunkan beberapa istilah terpenting dalam pemahaman mengenai keislaman, yaitu kata Islam dan muslim. Kesemuanya berakar dari kata *salam* yang berarti kedamaian dan keselamatan. Kata Islam lebih spesifik lagi

Islam dan Masalah Kemanusiaan Perspektif Pendidikan Pembebasan

didapat dari bahasa Arab *aslama*, yang bermakna “untuk menerima, menyerah atau tunduk” dan dalam pengertian yang lebih jauh tunduk dan patuh kepada Tuhan (al-Azhari, 2001).

Menurut Syaikh Muhammad Ibn ‘Abdul Wahab, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya, tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdullah at-Tawajjiri, mendefinisikan Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesakan-Nya dan melaksanakan syariat-Nya dengan penuh ketaatan atau melepaskan dari kesyirikan. Sementara Khalifah Umar Ibn Khatab, mengartikan Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw, yang meliputi akidah, syariah dan akhlak.

Sudah demikian jelas masalah kemanusiaan dewasa ini begitu semakin problematik dan demikian krusial, seperti masalah kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, korupsi, ketidakadilan, penganiayaan, moralitas, diskriminatif dan kekerasan menjadi pemandangan yang demikian pulgar dan menjadi pemandangan sehari-hari seperti disajikan media elektronik dan surat kabar. Tentu saja pemandangan ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi, harus ada usaha untuk menyudahinya atau paling tidak meminimalisir intensitasnya. Belum lagi seperti diutarakan Asghar Ali Engineer (2006: 166), ada diskriminasi atas hak-hak perempuan, ketimpangan ekonomi, kemiskinan meraja lela dan hubungan kurang harmonis antara agama dengan negara (Engineer, 2009: 117).

Dalam kondisi seperti ini tentu saja peran pendidikan Islam menjadi sangat menentukan, pendidikan Islam sejatinya dimaksudkan untuk melakukan pembebasan terhadap berbagai ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah umat. Menurut salah seorang tokoh pendidikan pembebasan Paulo Freire (2000: 1) berpendapat bahwa pendidikan sejatinya adalah praktik pembebasan, karena ia membebaskan pendidik dan peserta didik dari perbudakan ganda berupa kebuisan dan monolog. Oleh karena itu, lembaga pendidikan berperan sebagai pembentuk

Ah. Choiron

kepribadian peserta didik harus ditempa sebagaimana mestinya. Lembaga pendidikan harus menjadi tempat dimana para peserta didik melakukan pembebasan dirinya dan melakukan aktualisasi atas berbagai harapan hidup pada masa mendatang.

Dalam hal ini Paulo Freire (2000: 13) berupaya membuat formulasi model pendidikan yang mampu memberikan pembebasan terhadap berbagai bentuk penindasan peserta didik, sehingga mereka dapat melakukan aktualisasi diri dan melawan terhadap berbagai hegemoni atas berbagai harapan hidup yang dicita-citakan. Dalam pandangan Freire (2008: 11), seperti dikutip Umiarso dan Zamroni (2011: 52-53), pendidikan pembebasan bermuara pada realitas dikotomi peran guru dan peserta didik yang dikonsepsikannya dengan istilah *banking of education*. Menurutnya, kebebasan berarti ketidakterpaksaan. Kebebasan fisik berarti fisik bebas bergerak ke mana saja. Kebebasan moral berarti tiada paksaan terhadap kebebasan moral. Kebebasan psikologi berarti kebebasan untuk memilih suatu yang dikehendaki. Kebebasan beragama berarti setiap orang memiliki kebebasan dalam menentukan agama yang dianutnya. Dalam hal ini, menurut Freire, kebebasan ada dua macam, yaitu kebebasan vertikal, yaitu kebebasan yang terkait dengan Tuhan dan kebebasan horizontal, yaitu kebebasan yang terkait dengan sesama manusia.

Pendidikan Islam pembebasan pada dasarnya adalah proses memanusiaikan manusia atau meletakkan manusia pada fitrahnya sebagaimana ditentukan oleh Tuhan. Dalam hal ini Driyarkara (1950: 74) berpendapat bahwa pendidikan diartikan sebagai suatu upaya memanusiaikan manusia atau mengangkat taraf manusia ke posisi yang lebih insani. Senada pendapatnya Ki Hajar Dewantara (1982), pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan segala tuntutan peserta didik, maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntut segala tuntutan kodrati yang ada pada diri peserta didik sehingga kelak ia dapat mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat merengkuh kebahagiaan hidup setinggi-tingginya.

Dari latar belakang diatas, penulis mencoba menguak tabir permasalahan kemanusiaan perspektif teologi pembebasan. Teologi

pembebasan adalah kata majemuk dari dua kata, yaitu teologi dan pembebasan. Secara etimologis, teologi berasal dari *theos* yang berarti Tuhan dan *logos* yang berarti ilmu. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Sedangkan kata pembebasan merupakan istilah yang muncul sebagai reaksi atas istilah pembangunan (*development*) yang kemudian menjadi ideologi pengembangan ekonomi yang cenderung liberal dan kapitalistik dan umum digunakan di negara dunia ketiga sejak tahun 60-an (Francis Wahono Nitiprawiro, 2008: 8-9). Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan yang berorientasi pada ideologi liberalisme dan kapitalisme banyak berakibat buruk terutama bagi kalangan menengah ke bawah (miskin) sehingga tercipta jurang pemisah antara golongan kaya dengan golongan miskin (Basri, 2010).

B. Pembahasan

1. Pendidikan Islam

Sedangkan menurut Suhartono Suparlan (2009: 77), istilah pendidikan berasal dari bahasa Inggris *education*. Secara lengkap dia katakan: *Education* berasal dari kata Latin *educare*, yang berarti bimbingan yang berkelanjutan (*to lead forth*). Jika diperluas, pengertian etimologis ini mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia terjaga. Proses bimbingan dari negerasi ke generasi dan sepanjang masa.

Sementara dalam perspektif pendidikan Islam, menurut Sayid Muhamad al-Naquib al-Attas (1984: 13), seperti dikutip Ahmad Tafsir (2007: 28-29), menjelaskan demikian: "Dalam Islam dikenal tiga istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan pengertian pendidikan, yaitu: *Tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Istilah *ta'dib* lebih tepat digunakan untuk mengartikan pendidikan. Istilah *tarbiyah* terlalu luas untuk mengartikan pendidikan, sebab mencakup pendidikan untuk hewan. Kata *adab* berasal dari kata *adabun* mengandung pengertian pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan

Ah. Choiron

dan wujud bersifat teratur secara *hierarki* sesuai tingkatan derajat mereka tentang seseorang yang telat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual, dan rohaniah seseorang. Pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia, tentang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam tatanan wujud sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud tersebut secara baik dan benar.”

Menurut Ki Hadjar Dewantara, seperti dikutip Siswoyo, dkk., (2007: 20), yang dimaksud dengan pendidikan adalah pada dasarnya tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Dalam arti luas, Suhartono (2009: 79) mendefinisikan pendidikan sebagai segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang jaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan adalah merupakan sistem proses perubahan menuju kedewasaa, pencerdasan, dan pematangan diri. Dewasa dalam perkembangan badan, cerdas dalam perkembangan jiwa, dan matang dalam hal perilaku.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam arti luas mengandung arti sebagai berikut: (a) Pendidikan berlangsung sepanjang jaman (*long life education*), dalam arti dari generasi ke generasi tanpa henti, (b) Pendidikan berlangsung dalam setiap bidang kehidupan umat manusia, yakni pendidikan

berproses baik pada bidang pendidikan sendiri, sosial, budaya, dan sebagainya, (c) Pendidikan berlangsung disegala tempat dimana pun, dan (d) Objek pendidikan adalah manusia dalam memanusiaikan diri dan jiwanya.

Sementara dalam arti sempit pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu: (a) Pendidikan berlangsung dalam waktu terbatas yakni masa anak-anak, remaja, dan dewasa, (b) Pendidikan berlangsung dalam ruang terbatas yakni lembaga persekolahan, (c) Pendidikan berlangsung dalam situasi khusus yang sengaja diciptakan menurut administrasi pendidikan, (d) Pendidikan isinya disusun secara sistematis dan terprogram dalam bentuk kurikulum, dan (e) Tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar, yakni tujuan mengembangkan kemampuan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya.

2. Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer

Ali Engineer mengkritik terhadap masalah kemanusiaan. Menurut Asghar Ali Engineer, seperti dikutip Djohan Effendi, Islam sejatinya datang dengan semangat pembebasan, membebaskan kaum tertindas dari penindasan kaum aristokrat Qurais yang semena-mena. Akan tetapi sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan generasi sahabat, Islam kehilangan elan vitalnya. Khilafah Bani Umayyah dan Khilafah Bani Abbasiyah tidak bisa melestarikan dan melanjutkan perjuangan yang pernah dicontohkan Rasulullah Saw dan generasi Khalifah al-Rasyidun. Menurut Aghar Ali, salah satunya bisa dilihat dari konsep teologi Islam yang berkembang sampai sekarang. Teologi Islam yang pada awalnya demikian dekat dengan keadilan sosial dan ekonomi, sosial dan politik, serta masalah budaya umat manusia, kemudian beralih ke masalah-masalah yang berbau eskatologi dan masalah yang bersifat non duniawi. Menurut Djohan Effendi sebagaimana dikutip oleh Enggineer (1999: x) menjelaskan Teologi Islam kemuddian berkembang dengan metode skolastik dan spekulatif yang melangit dan tidak membumi.

Pada tahap selanjutnya, teologi Islam kemudian menjadi sebatas Ilmu Kalam yang skolastik dan spekulatif. Ilmu yang mengatur tentang perdebatan antara aliran mutakallimun, dengan tema kehendak bebas dan ketundukan pada takdir, menjadi dominan terkait dengan upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat persoalan politik. Kekacauan politik yang melanda umat Islam menimbulkan pertanyaan tentang dosa besar, mukmin dan kafir. Inilah yang ingin diselesaikan secara intelektual oleh teologi Islam saat itu (Kusnadinigrat, 1999: 29-30).

Bagi Asghar Ali Engineer, para ulama Islam yang dekat dengan penguasa ini kemudian kehilangan aspek pembebasan, mereka lupa dinina-bobokan oleh situasi yang sengaja diciptakan oleh penguasa Khilafah Bani Umayyah kala itu. Melalui cara ini mereka saling diuntungkan, para ulama pendukung pemerintah diuntungkan oleh fasilitas yang diberikan pemerintah dan pemerintah memperoleh justifikasi dan dukungan dari para ulama yang sebenarnya harus menjadi panutan umat. Fenomena menunjukkan kaum ulama menjadi lebih sering bersama para penguasa yang tiran ketimbang menjadi pengayom masyarakat, ulama sering menjadi pembela penguasa yang melakukan penindasan terhadap masyarakat kecil, posisi rakyat semakin dipojokan. Sebagai akibatnya jumlah rakyat miskin semakin bertambah, jumlah budak berlipat ganda, tradisi harem dihidupkan kembali, dan orang non Arab diperlakukan sewenang-wenang dan tidak beradab (Engineer, 1999: 55).

Dari konteks fenomena seperti ini, maka teologi Islam, menurut Asghar Ali semakin jauh dari perhatian kepada masyarakat lemah. Teologi Islam hanya berbicara tentang keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, ketidakmungkinan adanya Tuhan selain Allah, tentang polemik kehendak bebas dan takdir, dan masalah-masalah eskatologis. Teologi Islam tidak lagi berbicara tentang bagaimana membantu fakir miskin, memelihara anak yatim, bersikap kritis terhadap kekuasaan, membebaskan budak dan orang tertindas, mempromosikan kesetaraan jender, dan tema-tema pembebasan lainnya. Selain itu, keberpihakannya juga cenderung kepada

penguasa. Maka, dalam kondisi demikian, Asghar Ali bisa memahami kritik Marx bahwa agama adalah candu masyarakat (Engineer, 1999: 29). Sesungguhnya yang dimaksud Marx bukan agamanya yang menjadi candu masyarakat, tetapi pemahaman mayoritas kaum agamawan terpendang (kaum pendeta) yang meracuni masyarakat (Suseno, 1999).

3. Konsep Pembebasan Islam Asghar Ali Engineer

Bagi Asghar Ali Engineer Islam adalah sebagai agama yang mengandung semangat pembebasan. Melakukan pembebasan terhadap budak-budak, melakukan pembebasan terhadap kaum perempuan, melakukan pembebasan terhadap orang miskin dan melakukan pembebasan terhadap kaum tertindas. Oleh karena itu, Asghar Ali mencoba untuk merevitalisasi nilai-nilai pembebasan Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Saw dan merumuskan kembali teologi Islam sebagai teologi pembebasan. Bagi Asghar Ali Engineer, usaha revitalisasi dan perumusan teologi Islam menjadi teologi pembebasan harus didasarkan pada dua hal, yaitu:

Pertama, berdasarkan pada analisis kesejarahan pembebasan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw (*history method*). Dalam hal ini keyakinan Asghar terhadap Nabi Muhammad Saw sama seperti dengan keyakinan penganut teologi pembebasan di negara-negara Amerika Latin terhadap Yesus Kristus. Nabi Muhammad Saw diutus sebagai nabi dan rasul untuk melakukan proses pembebasan umat manusia dari penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan orang-orang Qurais. Struktur masyarakat Arab di mana Nabi Muhammad Saw lahir waktu itu mencerminkan ketimpangan sosial dan budaya timpang. Terdapat segolongan kaum aristokrat yang berkuasa dan penguasa yang kaya raya. Sedangkan mayoritas lainnya adalah orang miskin dan para budak yang ditindas secara sistemik. Ajaran Nabi Muhammad Saw, ditolak semata-mata bukan karena ajarannya untuk menyembah Allah SWT, tapi karena implikasi sosialnya yang akan secara radikal merubah tatanan yang tidak adil itu. Selain itu, dalam sejarah, Nabi Muhammad Saw juga telah melakukan upaya-upaya

Ah. Choiron

radikal untuk memberi posisi yang layak pada perempuan, setelah sebelumnya posisi perempuan dalam budaya waktu itu berada pada tempat yang sangat rendah.

Kedua, dari banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit mendorong proses pembebasan, seperti ayat tentang pemerdakaan budak, kesetaraan umat manusia, kesetaraan gender, kecaman atas eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi, dan keadilan di mata hukum. Sebagian ayat perlu ditafsir ulang karena penafsiran yang ada saat ini terhadap sebagian ayat itu, menurut Asghar Ali tidak sesuai lagi dengan semangat pembebasan awal, semisal ayat-ayat tentang kesetaraan gender. Dalam pembacaan ayat-ayat al-Qur'an ini Asghar Ali Engineer menggunakan pendekatan sosio-historis sebagaimana *double movement*-nya Fazlur Rahman. Asghar Ali mencoba kembali ke masa lalu di mana ayat-ayat itu turun (*Asbab Nuzul*), mengambil esensi dasar dari maksud ayat itu, kemudian dikontekstualisasikan pada problem-problem kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dari dua hal inilah Asghar Ali Engineer hendak menggali teologi pembebasan dari nilai-nilai dasar Islam. Berbeda dengan Gustavo Guiterez yang tinggal menuliskan apa yang baru saja terjadi, Asghar Ali mencoba untuk merekonstruksi kembali apa yang terjadi, terutama, pada praksis pembebasan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw empat belas abad yang lalu. Paling tidak ada tiga masalah besar yang menjadi perhatian Asghar Ali Engineer dalam merealisasikan proyek revitalisasi teologi Islam menjadi teologi pembebasan, yaitu:

a. Masalah kesetaraan manusia

Pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, masyarakat Arab dikenal fanatik terhadap suku mereka. Sikap fanatisme atau *ashabiyah* ini terekspresikan dengan memandang rendah orang di luar kelompoknya. Selain itu, sebagaimana di belahan bumi lainnya, perbudakan adalah sesuatu yang lazim. Tindakan nabi memilih sahabat Bilal sebagai petugas azan (*muazzin*) pada waktu itu sungguh merupakan tindakan yang menurut Asghar Ali cukup

revolusioner, sebab sebelumnya, bilal yang berasal dari etnis berkulit hitam dari Afrika tersebut adalah bekas budak. Dengan cara ini nabi menunjukkan bahwa harkat martabat manusia melampaui batas-batas etnis, suku, warna kulit, merdeka atau hamba sahaya (Engineer, 1999: 47).

Selanjutnya, al-Qur'an juga menegaskan bahwa sesungguhnya semua umat manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Tidak ada yang lebih mulia satu dari lainnya berdasarkan etnis, suku ataupun warna kulit. Dalam pandangan Islam kemuliaan seseorang hanya bisa dicapai lewat kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT menyatakan dalam salah satu firman-Nya:

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. al-Hujurat: 13).

Ayat di atas diperuntukkan tidak hanya bagi orang Arab, tetapi bagi seluruh umat manusia di muka dunia. Dewasa ini, persoalan kesetaraan umat manusia masih menjadi persoalan dunia, perbudakan dalam bentuk lain semakin meraja lela, penindasan terjadi di mana-mana, dan perilaku sewenang-wenang demikian subur. Tindakan rasisme masih menghinggap di banyak pikiran orang, padahal pada saat yang sama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan peneguhan betapa penting tindakan persamaan.

b. Masalah ketidakadilan gender

Sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul Allah, keberadaan perempuan sangat memilukan, mereka tidak memiliki hak sedikitpun bahkan terhadap dirinya sendiri (Nasir, 1992). Namun begitu Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul Allah,

Ah. Choiron

untuk pertama kalinya perempuan Arab mendapatkan banyak hak yang sebelumnya tak terbayangkan. Perempuan pada masa itu dalam posisi sub-ordinat yang sangat lemah. Kemudian Nabi Muhammad Saw menetapkan, perempuan bisa mewarisi, bisa mempunyai hak milik sendiri, posisinya dipertimbangkan di hadapan hokum, bisa menta cerai dan bisa menentukan dirinya sendiri. Pada sisi lain, poligami yang sebelumnya tanpa batas, kemudian dibatasi maksimal empat istri. Itupun dengan persyaratan yang ketat. Sedangkan poliandri dengan tegas dilarang (Engineer, 1999: 47).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW merubah perlakuan masyarakat terhadap anak perempuan. Jika sebelumnya masyarakat Arab mempunyai tradisi mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena rasa malu dan merasa terboboti, kemudian Nabi Muhammad Saw melarang keras tradisi itu sekaligus merubah stigma negatif terhadap anak perempuan. Selain itu, Islam juga memberikan hak yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, hak untuk memimpin, hak untuk bekerja dan hak untuk terlibat aktif pada urusan publik. Untuk itu, pada sisi lain, Asghar Ali Engineer mengkritik negara-negara yang mengatasmakan Islam melakukan pengekangan terhadap hak-hak perempuan, seperti banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Selatan (Engineer, 1999: 48).

c. Masalah Ketimpangan Ekonomi

Masalah berikutnya yang banyak disoroti oleh Asghar Ali Engineer adalah masalah ketimpangan ekonomi. Seperti halnya terjadi di beberapa negara di Amerika Latin, ketimpangan ekonomi yang demikian parah juga terjadi di banyak negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Bagi Asghar Ali hal ini tentu saja tidak wajar dan tidak seharusnya terjadi, sebab sejatinya al-Qur'an mengusung demikian kuat keadilan dan pemerataan ekonomi. Bagi Islam tidak boleh terjadi pemusatan ekonomi pada satu orang tertentu. Dalam al-Qur'an, kata kunci keadilan adalah *'adl* dan *qist*. *'Adl* dalam bahasa Arab mengandanung arti *sawiyah* atau persamaan atau kesetaraan. Kata itu juga mengandung makna pemerataan dan kesamaan hak.

Sedangkan *qist* mengandung arti distribusi, jarak yang merata, keadilan dan kewajaran (Engineer, 1999: 59-60).

Dengan konsep ini, maka yang diinginkan oleh al-qur'an sesungguhnya terjadi pemerataan kekayaan dan sumber ekonomi. Oleh karena itu Islam melarang konsentrasi harta pada pihak-pihak tertentu, menentang perilaku bermewah-mewahan dengan harta, sementara pada saat yang sama banyak orang lain yang membutuhkan dan berkekurangan. Konsentrasi seperti ini dalam konteks saat ini bisa pada diri perseorangan atau kelompok dalam satu wilayah atau negara, bahkan bisa lintas negara. Polaritas antara Negara Utara dan Negara Selatan di mana kebanyakan negara berpenduduk mayoritas Islam berada di situ, adalah juga bentuk konsentrasi kekayaan dan sumber ekonomi. Negara Utara, terutama negara-negara G-8, mewakili negara dengan kekayaan berlimpah, sedangkan Negara Selatan mewakili negara dunia ketiga yang miskin dan termiskinkan (Engineer, 1999: 123).

Selain itu, Asghar Ali Engineer juga mengkritisi praktik ekonomi yang saat itu banyak dikecam adalah praktik riba yang banyak ditafsirkan sebagai bunga. Dalam konteks kehidupan modern, riba selalu dikonotasikan dengan dunia perbankan dan praktik rentenir. Bagi Asghar Ali tidak setuju dengan penafsiran ini. Menurutnya riba tidak sekedar bunga bank. Riba lebih dari sekedar bank. Oleh karena itu, menghilangkan bunga bank tidak akan berpengaruh banyak terhadap praktik riba. Menurut Asghar Ali, riba adalah praktik eksploitasi sumber-sumber ekonomi yang harus dipahami dalam konteks sistem ekonomi kapitalistik sekarang ini. Maka, kemunculan bank-bank tanpa bunga atau bank-bank dengan label syari'ah, tidak akan mempengaruhi usaha meminimalisir eksploitasi ekonomi tersebut.

Selanjutnya Asghar Ali Engineer menunjuk pada struktur ekonomi yang timpang antara Negara Utara dan Negara Selatan, aturan-aturan perdagangan seperti yang dibuat WTO, atau aturan bantuan oleh World Bank dan IMF yang menciptakan ketergantungan negara miskin dan menguntungkan negara kaya sebagai negara

Ah. Choiron

donor. Selain itu Asghar Ali juga menunjuk dominasi *Multinational Corporation* (MNC) dan *Transnational Corporation* (TNC) yang banyak mengeksploitasi kaum buruh dan sumberdaya alam di negara-negara dunia ketiga (Engineer, 1999: 143). Tindakan eksploitatif ini sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan mereda, bahkan seiring dengan menguatnya madzhab ekonomi *neo-liberal*, negara-negara kuat semakin kuat untuk mengekspresikan naluri-naluri eksploitatifnya dengan menekan negara-negara lemah agar membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Bahkan sehari setelah dilantik menjadi Presiden Amerika yang ke-45, Donald Trump, secara tegas menyatakan bahwa ekspansi Amerika ke Irak adalah atas dasar penguasaan lahan minyak milik rakyat Irak (Kompas, 22 Januari 2017).

Namun tidak bisa dipungkiri, sama seperti pernah digagas oleh Fazlur Rahman ketika masih di Pakistan (Rahman, 1992), tawaran Asghar Ali Engineer mengenai masalah ketidakadilan ekonomi ini sangat problematis. Pada masalah bunga bank, ia tidak setuju dengan upaya pendirian perbankan tanpa bunga, karena cara seperti itu hanya artificial semata dan tidak menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya, yaitu sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif. Bagaimana mungkin sebuah bank bisa menjalankan roda perekonomiannya sementara untuk menghidupi dirinya sendiri tidak memiliki dana.

Dalam hal ini Asggar Ali Engineer belum memberi solusi yang jelas atas problem perbankan ini. Pada sisi lain, kritiknya atas sistem ekonomi kapitalis tidak disertai dengan tawaran yang kongkrit tentang sistem ekonomi alternatif. Gagasannya yang cenderung sosialis tidak serta merta diikuti dengan tawaran sistem ekonomi sosialis atau system ekonomi lainnya yang menjadi alternative dari kapitalisme. Untuk konteks sekarang ada banyak contoh dari Amerika Latin yang secara kebetulan merupakan basis Teologi Pembebasan. Di sana kapitalisme mendapat goyangan yang cukup hebat karena semakin banyaknya tokoh-tokoh “kiri” yang menjadi presiden. Mereka kemudian membawa negaranya beralih ke sistem

yang populer dengan sebutan 'neo-sosialisme' yang merupakan revisi dari sosialisme yang dinilai kurang mampu membawa kemakmuran (Faqih, 2002).

4. Pendidikan Islam Pembebasan solusi Dehumanisasi

Semula teologi pembebasan muncul di kawasan Amerika Latin sebagai respon atas kondisi sosial, ekonomi dan politik saat itu. Sejak tahun 1950-an negara-negara kawasan Amerika Latin ini melakukan proses industrialisasi di bawah arahan modal multinasional. Namun karena mementingkan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi telah menciptakan kesenjangan sosial yang begitu tajam. Urbanisasi meningkat tajam. Kaum proletar, kelas buruh, tumbuh dengan begitu cepat. Inflasi melambung, biaya hidup membubung. Ketidakpuasan meluas, situasi politik menjadi tegang dan labil. Kudeta terjadi di mana-mana dan membuahkan pemerintahan diktator militer. Pada saat yang sama, otoritas gereja Katholik mulai terbuka terhadap perubahan dan pandangan-pandangan dari luar (Lowy, 1999: 40). Kondisi ini telah menyeret otoritas gereja pada masalah yang terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan politik secara luas, gereja menjadi ujung tombak bagi penyelesaian masalah-masalah kemiskinan dan ketertindasan (Nitiprawiro, 2008: 58).

Terkait kondisi tersebut, teologi pembebasan semula merupakan gerakan yang dilakukan oleh para Romo, Uskup, dan bagian-bagian lain gereja sejak awal tahun 60-an. Mereka ini memimpin pembebasan dan menjadikan gereja sebagai pelindung orang miskin. Baru sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1971, Gustavo Gutierrez dari Peru, melakukan orang yang pertama kali melakukan formulasi paham teologi pembebasan secara akademik melalui bukunya, *Teologia de la Liberacion*. Kemudian disusul oleh beberapa ilmuan yang secara intensif melakukan kajian terhadap teologi pembebasan, seperti Juan Louise Segundo dari Uruguay, Hugo Asmann dari Brazil dan John Sabrino dari El Salvador. Bila dicermati secara seksama, mereka ini adalah para ilmuan yang berasal dari gereja-gereja Katholik di negara bagian Amerika Latin yang memiliki otoritas dan profesional secara akademis. Oleh karena itu

Ah. Choiron

wajar apabila Michael Lowy berpendapat bahwa teologi pembebasan menjadi mainstream dan paradigma yang khas dari Amerika Latin (Lowy, 1999: 26).

Dalam konteks teologi pembebasan, Yesus dipandang sebagai Sang Pembebas dan Juru Selamat. Yesus lahir untukewartakan kabar gembira kepada orang miskin, danewartakan pembebasan bagi mereka yang terbelenggu, yang telah dengan berani menghadapi serangan para penguasa Romawi yang menindas orang Yahudi. Pengikut Teologi Pembebasan memang tak menyangkal bahwa mereka menggunakan analisis marxian. Peranan marxisme hanyalah alat analisis yang dapat merekam dan mendeskripsikan ketidakadilan dan praktik kekerasan yang semakin meraja lela. Sementara pada sisi lain mereka menolak filsafat materialisme, ideologi ateis dan pengertian agama sebagai candu masyarakat (Lowy, 1999: 156).

Kesadaran tentang keperluan teologi pembebasan rupanya juga muncul di kalangan umat Islam. Dengan sebab yang boleh jadi sama, tidak sedikit negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim juga dilanda masalah yang sama, seperti masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan sosial, dan penderitaan menghinggapi mayoritas masyarakat muslim, baik di Asia maupun di Afrika. Permasalahan yang tidak kalah miris adalah kondisi umat muslim yang berada di negara-negara yang secara mayoritas beragama non muslim, seperti di Thailand, Vietnam, dan Filipina. (Kompas, 12 Desember 2016). Para teolog Islam berpandangan bahwa dengan adanya fenomena tersebut seharusnya teologi Islam yang selama ini dianut oleh kaum muslimin harus dilakukan revitalisasi sehingga bermanfaat ganda, yang bukan hanya berorientasi membela Tuhan tetapi juga bisa menjadi pembebas terhadap berbagai ketimpangan social di tengah-tengah masyarakat muslim.

Para teolog muslim yang selama ini gencar memperjuangkan revitalisasi teologi Islam, dimana teologi Islam tidak hanya bermakna penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan tetapi juga bermakna penyelamatan terhadap masyarakat yang tertindas, dapat disebutkan, seperti Hassan Hanafi dari Mesir yang terkenal dengan gagasan *Al-*

Yasar Al-Islami atau Kiri Islam, Ziaul Haque dari Pakistan, yang menulis buku yang cukup provokatif, yaitu *Revelation and Revolution in Islam* atau Wahyu dan Revolusi dalam Islam, Ali Syari'ati dari Iran yang dianggap sebagai ideolog Revolusi Iran dan Asghar Ali Engineer dari India, yang pemikirannya akan banyak mewarnai tulisan artikel ini.

Khusus dalam dunia pendidikan, secara klasik dipandang sebagai suatu pranata sosial yang dapat dijalankan pada tiga fungsi, yaitu penyiapan generasi muda, mentransfer ilmu pengetahuan dan mentransfer sistem nilai pada generasi penerus sebagai jalan untuk melestarikan kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban (Hasan Langgulung, 1980: 92). Tentu saja fungsi pendidikan tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat yang berharap untuk terus berkembang dan lebih maju, sehingga fungsi pendidikan maksimal menjadi agen perubahan (Karim, 1999: 28). Namun dalam perjalanannya sering muncul dilemma, disatu sisi pendidikan bisa berfungsi maksimal dalam melakukan perubahan dan kemajuan zaman, namun di sisi lain penguasa terkadang menempatkan pendidikan secara politis, sehingga yang terjadi tidak jarang justru kontra produktif dan melahirkan permasalahan sosial. Tentu saja kepentingan publik menjadi terabaikan.

Dalam konteks ini, pendidikan pembebasan merupakan proses bagaimana masyarakat menemukan hal yang paling esensi dalam kehidupannya, yaitu merubah kehidupannya yang lebih baik dan merdeka (Azzet, 2011: 9). Merujuk pada pendapat Paulo Freire dan Ivan Illich (1999: 437), pendidikan pembebasan adalah pendidikan yang menumbuhkembangkan kesadaran kritis serta mendorong kemampuan peserta didik untuk memiliki kedalaman menafsirkan fenomena sosial dalam kehidupannya. Pendidikan pembebasan juga bermaksud membangun kepercayaan pada setiap diri peserta didik untuk menyikapi keadaan yang terjadi. Pendidikan pembebasan Islam sangat mementingkan proses dan memaksimalkan hasilnya. Dengan kata lain, prosesnya halal (*halalan*) dan hasilnya baik (*thoyyiba*).

Pendidikan Islam pembebasan merupakan upaya konkret memperoleh pengetahuan dan menjadi proses transformasi yang diuji dalam kehidupan antara peserta didik mesti terjadi dalam hubungan timbal balik. Sumbangan pemikiran menjadi salah satu model pendidikan pembebasan dalam masyarakat yang cenderung terbelakang dan miskin. Sebuah kebebasan memiliki batasan-batasan tertentu, kebebasan tanpa batas akan membentur hak-hak orang lain dan akhirnya menimbulkan anarki dan mendistorsi makna pembebasan itu sendiri. Pembebasan dalam konotasi pendidikan Islam tentusaja adalah pembebasan yang dilandasi nilai-nilai spiritual Ilahiyah dan insaniyah. Kebebasan bukanlah cita-cita yang letaknya diluar manusiawi apalagi tercerabut dari nilai dasar Ilahiyah. Kebebasan lebih merupakan syarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi agar manusia dapat memulai perjuangan untuk menjadi manusia utuh (**Freire et. all, 2009: 438**). Dalam konteks Freire dan Illich, hal ini merupakan kritik terhadap sistem pendidikan yang ada di Brazil (Paulo Friere, 1985).

Menurut Muhammad Faadhil al-Jamaliy (1967: 99), pendidikan Islam pembebasan bertujuan: (a) agar seseorang mengenal statusnya sebagai makhluk dan tanggung jawab masing-masing di dalam hidup mereka di dunia, (b) mengenal interaksinya di masyarakat dan tanggung jawab mereka di masyarakat, (c) supaya manusia kenal alam semesta dan membimbingnya mencapai hikmat Allah dan memungkinkan manusia menggunakannya, (d) supaya manusia kenal Tuhan Pencipta alam dan mendorong untuk beribadah kepadanya. Menurut Syed Muhammad Naqueib al-Attas (1979: 1), tujuan pendidikan Islam ialah menjadikan manusia itu orang yang baik. Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasy (1975: 22-25), pendidikan Islam bertujuan untuk: (a) membantu pembentukan akhlak yang mulia, (b) persiapan kehidupan dunia dan akhirat, dan (c) persiapan mencapai rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Pendidikan Islam tidaklah semuanya bersifat akhlak, atau spritual semata, tetapi menaruh perhatian pada segi kemanfaatan pada tujuan-tujuan, kurikulum, dan aktivitasnya.

Islam dan Masalah Kemanusiaan Perspektif Pendidikan Pembebasan

Menurut al-Abrasy, para praktisi pendidikan Islam memandang kesempurnaan manusia tidak akan tercapai kecuali dengan memadukan antara ilmu agama dan pengetahuan umum, atau menaruh perhatian pada segi-segi spritual, akhlak dan segi-segi kemanfaatan dunia. (d) menumbuhkan jiwa ilmiah dan memuaskan keinginan diri untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar sabagai ilmu, (e) menyiapkan pembelajar dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi, teknis dan perusahaan tertentu, supaya ia dapat mencari rizki dalam hidup dengan mulia disamping memelihara segi spritual dan keagamaan.

Menurut Paulo Freire dan Ivan Illich (2009: 446), hal paling mendasar pendidikan pembebasan adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan pembebasan harus dijadikan sebagai pendidikan humanis, liberalis, dan islamis. Untuk itu maka pendidikan harus menjadi jalan menuju pembebasan umat manusia, karena tujuan utama kemanusiaan adalah keadilan humanis. Bagi Paulo Freire pendidikan pembebasan bukanlah pencarian kebebasan individu semata, melainkan tujuan humanisasi sosial. Hal ini dilatarbelakangi oleh keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat Brazil yang tertindas (*oppressed*). Kebebasan harus diperjuangkan dan direbut, sebab ia bukan sebuah hadiah (Freire et. all, 1985: 45).

Pendidikan Islam pembebasan yang memanusiakan manusia, yaitu pendidikan yang berpusat kepada kepentingan peserta didik dan sesuai dengan perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang merdeka dan beradab. Karena manusia merdeka dan beradablah yang bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan nyata. Inilah hal mendasar dalam pendidikan Islam pembebasan (Azzet, 2011: 22). Pendidikan Islam pembebasan yang humanis akan mereduksi dehumanisasi, dengan demikian dalam praktiknya akan bisa menghargai hubungan dialektis antara kesadaran manusia dan dunia, atau antara manusia dan dunianya dan manusia dengan Tuhan.

Demikianlah, pendidikan Islam pembebasan semestinya membangun kesadaran peserta didik untuk berani bersikap kritis terhadap *status quo*. Hal ini bukan berarti membangun kesadaran peserta didik agar selalu berfikir untuk memberontak terhadap *status quo*. Sama sekali bukan, akan tetapi kesadaran untuk berani bersikap dan kritis terhadap *status quo* ini sangat penting agar jangan sampai manusia yang satu ditindas oleh manusia lainnya. Jangan sampai kelompok yang satu mengebiri kemerdekaan kelompok lainnya. Sudah barang tentu, pendidikan tidak boleh membiarkan penindasan terjadi, apalagi mendukung keberadaannya. Disinilah pentingnya membangun kesadaran peserta didik untuk berani bersikap dan kritis terhadap *status quo* itu. Sebab pendidikan berkewajiban membawa kehidupan manusia untuk senantiasa sejalan dengan hakikat kemanusiaannya secara fitri (Freire et. all, 2009: 457).

5. Komponen pendidikan Islam Pembebasan

Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan Islam pembebasan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan pembebasan, yang menentukan berhasil dan tidaknya proses pendidikan pembebasan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan pembebasan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut (Syaefudin, 2005: 51).

Sebagai sebuah proses, pendidikan Islam pembebasan adalah proses mencari pengalaman islami. Peserta didik bukan makhluk yang termarjinalkan, mereka seharusnya memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan dirinya dan pengalaman. Di sini tugas pendidik bukan menggunakan alat dan cara tersebut untuk menemukan objek pengetahuan dan kemudian menawarkan secara paternalistik kepada peserta didik, karena ini berarti mengingkari usaha peserta didik untuk memperoleh pengetahuan (Freire, 2008: 11). Sebab pendidikan dipandang sebagai nilai-cara, maka pendidikan pembebasan harus menjadi aksi atau tindakan

kultural untuk pembebasan dan revolusi cultural (Simon, 2011: xvi). Nilai dan cara pertama yang harus diusahakan oleh pendidik adalah praksis peningkatan kesadaran bahwa pendidikan merupakan proses yang baik. Sebab menurut Paulo Freire pendidikan pembebasan sebagai alat paling penting untuk mencapai perubahan-perubahan sosial (Simon, 2011: 128).

a. Peserta didik

Pendidikan pembebasan adalah sebuah model pendidikan yang peserta didik bisa berperan aktif dalam proses belajar yang sedang berlangsung. Seorang guru atau pendidik yang lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar dinilai tidak membuat peserta didik kurang bisa berkembang dengan baik dalam menjalani proses pendidikan. Bila demikian yang terjadi, maka proses pembelajaran di kelas hanya berjalan satu arah, yakni dari guru kepada peserta didik. Model pendidikan seperti ini biasa disebut sebagai pendidikan yang monolog. Pendidikan model seperti inilah yang dahulu dikritik Freire sebagai model pendidikan yang tidak manusiawi. Artinya, pendidikan semacam ini tidak semakin memanusiakan manusia (dehumanisasi) terhadap peserta didik. Hal ini karena peserta didik berperan secara pasif dalam pendidikan sehingga tidak bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Peserta didik menjadi terkekang dan tidak bebas.

Paulo Freire mengkritik kondisi pendidikan di Brazil waktu itu, yang menurutnya sangat tiran. Sehingga Freire menyatakan dalam bukunya *Pedagogy Of The Oppressed* bahwa:

Education thus becomes an act of depositing, in which the students are the depositories and the teacher is the depositor. Instead of communicating, the teacher issues communiques and makes deposits which the students patiently receive, memorize, and repeat. This is the "banking" concept of education, in which the scope of action allowed to the students extends only as far as receiving, filing, and storing the deposits (Freire, 2006: 72).

Konsep pendidikan “gaya bank” adalah model pembelajaran dalam pendidikan yang hanya satu arah (monologis). Asumsinya bahwa ilmu pengetahuan adalah sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka (baca; guru) yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka (baca; peserta didik) yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Menganggap bodoh secara mutlak pada orang lain. Hal itu menunjukkan sebuah ciri dari ideologi penindasan, yang berarti mengingkari pendidikan dan pengetahuan sebagai proses pencarian jati diri manusia seutuhnya.

Secara sederhana Paulo Freire (2006: 73) menyusun daftar antagonisme pendidikan “gaya bank” sebagai berikut: (a) guru mengajar-peserta didik diajar, (b) guru tahu segalanya-peserta didik tidak tahu apa-apa, (c) guru berpikir-peserta didik dipikirkan, (d) guru bicara-peserta didik mendengarkan, (e) guru menentukan peraturan-peserta didik diatur, (f) guru memilih dan melaksanakan pilihannya-peserta didik menyetujui, (g) guru bertindak-peserta didik bertindak sesuai dengan tindakan gurunya, (h) guru memilih bahan apa yang akan diajarkan-peserta didik menyesuaikan diri dengan pelajaran itu, (i) guru mencampuradukkan kewenangan ilmu pengetahuan dengan kewenangan jabatannya, (j) guru adalah subjek proses belajar-sedangkan peserta didik objeknya belaka.

Tidak mengherankan jika pendidikan “gaya bank” memandang manusia hanya sebagai makhluk yang dapat disamakan dengan sebuah benda dan gampang diatur. Pendidikan *gayabanking* tersebut berarti ilmu pengetahuan yang ditransfer dari pendidik kepada peserta didik. Mungkin peserta didik menerima pengetahuan seperti itu sebagai hadiah atau barang dibeli. Tetapi peserta didik mendominasi yang harus menerima apa saja yang dikasih oleh gurunya dan peserta didik pasif.

Praktik dalam pendidikan “gaya bank”, pendidik harus mengganti ‘ekspresi diri’ dengan ‘penyetoran’ yakni menganggap peserta didik sebagai modal (capital). Semakin efisien peserta didik dalam belajar, berarti dia dianggap semakin terdidik. Padahal Praktik pendidikan yang membebaskan tidak menempatkan pendidik

pada posisi nomor satu dan peserta didik pada nomor dua. Karena pendidik atau guru adalah pihak yang memberi dan peserta didik adalah pihak yang menerima. Akan tetapi, lebih ditekankan pada proses tanya jawab atau berdiskusi dalam model pembelajarannya. Jika seorang pendidik memberikan sesuatu kepada peserta didik, ini sesungguhnya tak lebih dari proses berbagi kepada semua anak manusia perihal ilmu dan pengetahuan.

b. Materi kurikulum

Menurut Paulo Freire, materi kurikulum harus senantiasa dikritisi. Pendidik dan peserta didik perlu bekerja sama dalam menentukan isi yang mau dipelajari. Dalam pendidikan hadap masalah *problem posing* dengan jelas bahan itu ditentukan peserta didik sementara pendidik mengambil keadaan dari situasi hidupnya. Pendidik seharusnya mengemban transformatif dengan cara berdialog dengan yang lain bukan berusaha mewakilinya. Hubungan yang ideal antara pendidik dan peserta didik bukanlah hierarkikal sebagaimana dalam “pendidikan gaya bank”, tetapi merupakan hubungan dialogikal aktif.

Melalui hubungan yang bersifat dialogikal, (*the teacher-of-the-students and the students-of-the-teacher cease to exist and a new term emerges: teacher-student with students-teachers*) (Freire, 1995: 80). Guru bukan semata-mata sosok tunggal yang mengajar, tetapi orang yang mengajar dirinya melalui dialog dengan para peserta didik, yang pada gilirannya di samping diajarkan mereka juga mengajar. Peserta didik bukan hanya pendengar yang semata-mata patuh, tetapi juga rekan penyelidik yang kritis dalam dialog bersama guru. Guru bertugas mengedepankan suatu materi di hadapan murid-muridnya untuk meminta pertimbangan mereka tentang materi tersebut. Guru harus mempertimbangkan ulang materi ketika peserta didik mengekspresikan perspektif mereka tentang materi tersebut.

Peserta didik, bagi Paulo Freire, “*Students, as they are increasingly posed with problems relating to themselves in the world and with the world, will feel increasingly challenged and obliged to respond to*

that challenge” (Freire, 1995: 81). Murid diharapkan tidak demikian saja menerima keberadaannya, tetapi berani untuk secara kritis mempertanyakan keberadaannya, bahkan mengubahnya. Menurut Paulo Freire, tugas pendidikan yang demokratis adalah membantu kelompok-kelompok mengembangkan bahwa mereka sendiri bukan bahasa yang dibuat oleh pendidik atau atasan mereka sendiri perlu menciptakan bahasa lewat kehidupan dan peristiwa mereka sehari-hari. Cara yang digunakan adalah dengan dialog dan kerja sama antar guru dan peserta didik secara efektif dan efisien.

c. Metode mengajar

Metode mengajar dalam pendidikan Islam pembebasan juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pendidikan yang memanusiakan manusia menurut fitrah Ilahi. Sehingga dalam proses pendidikan membawa kelesuan-kelesuan bagi peserta didik. Akibat ulah dari para guru yang tidak tahu metode pengajaran yang baik sampai harus mengorbankan peserta didik. Metode seperti itu merupakan hasil dari metodologi warisan dari kolonial yang sebenarnya sudah usang. Metodologi konservatif merupakan metode pendidikan yang ditujukan untuk “belajar pada guru”. Pendidikan yang menjadikan guru sebagai pusat kegiatan belajar mengajar merupakan jebakan dalam metode pembelajaran “gaya bank” yang mana dalam siklus metode belajarnya hanya berpusat pada guru atau *trainer*. Banyak fasilitator, yang meskipun menggunakan istilah atau mengklaim sebagai fasilitator sejati tetapi kenyataan dalam praktiknya sama halnya seperti guru yang selalau memberikan model pembelajaran yang monologis kepada peserta didik (Faqih et. al, 2001: 63).

Menurut Freire, kebalikan dari pendidikan yang monologis yaitu pendidikan yang berjalan dua arah atau pendidikan yang dialogis. Pendidikan yang dua arah ini adalah senantiasa menempatkan peserta didik sebagai sahabat dalam proses belajar mengajar. Dalam pendidikan yang bersifat dialogis, sudah tidak lagi menempatkan seorang pendidik sebagai subyek yang menentukan semuanya, sedangkan peserta didik sebagai objek yang pasif dan tinggal menerima

segala apa yang telah dibuat dan diberikan oleh pendidik. Salah satu tujuan pendidikan Freire adalah keadilan. “Keadilan berasal dari fakta bahwa fase-fase perkembangan merupakan sebuah ukuran universal untuk menilai eksistensi manusia, karena keadilan berasal dari proses dialogis yang melahirkan pertumbuhan” (Smith, 2008: 117). Konsekuensi dari hal itu, keadilan akan mendorong pertumbuhan menuju aktualisasi diri, integrasi atau tingkat kesadaran, sedangkan ketidakadilan menghambat pertumbuhan akan terminimalisir.

Pembelajaran yang masih menggunakan gaya mengajar statis, tidak ada prinsip dialogis dan partisipatoris dalam tiap-tiap pembelajarannya, yang terjadi kemudian peserta didik dalam posisi sebagai objek tertekan untuk menerima transfer nilai-nilai keilmuan dari guru. Malah peran guru semakin dioptimalkan dengan sekaligus memberikan kesan kalau guru itu sosok yang maha tahu. Hal ini tentunya akan menciptakan jurang pemisah antara guru dan peserta didik. Kesenjangan ini dalam pendidikan semakin menciptakan kondisi yang statis dalam proses pembelajaran.

Jika secara dialog tidak mengharapkan apa-apa dari sebagian hasil dialog mereka, maka perkumpulan itu menjadi sesuatu yang kosong, hampa, birokratis dan menjemukan. Dialog sejati tidak akan terwujud kecuali dengan melewati pemikiran kritis yang melihat suatu hubungan yang tak tepisahkan antara manusia dan dunia tanpa melakukan dikotomi antar keduanya pemikiran yang memandang realitas sebagai proses dan perubahan, bukannya entitas yang statis. Pemikiran kritis senantiasa bergumul dengan problematika dan realitas sosial tanpa gentar menghadapi resiko. Pemikiran kritis berlawanan dengan pemikiran naif, pemikiran yang melihat waktu sejarah sebagai sebuah beban dan bersikap reserve dan menerima begitu saja (*taken for granted*). Hanya dialoglah yang menuntut adanya pemikiran kritis, yang mampu melahirkan pemikiran kritis. Karena itulah nilai-nilai kemanusiaan dalam proses dialog memiliki pengaruh yang sangat substansial karena itu pula sifat biologis dari pendidikan sebagai praktek pembebasan.

6. Tahapan Pendidikan Islam Pembebasan

Pendidikan Islam pembebasan adalah jalan menuju pembebasan umat manusia yang permanen menuju keadilan yang ditebarkan Tuhan. Untuk mencapainya, paling tidak ada dua tahapan, yaitu:

Tahap pertama dalam pendidikan pembebasan Paulo Freire ialah upaya penyadaran (*consientization*) akan ketertindasannya dari berbagai macam penindasan baik berupa pembodohan, perbudakan ganda, kebisuan dan monolog, sehingga ia dapat keluar dari kemelut itu menuju terciptanya manusia yang bebas, merdeka tanpa penindasan. Maka penyadaran bukanlah tujuan sederhana yang harus dicapai, tetapi merupakan tujuan puncak dari pendidikan untuk kaum tertindas (Smith, 2008: 5).

Tahap kedua dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas penyadaran itu dalam rangka pembudayaan sikap pemanusiaan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Intinya adalah disebut dengan *humanization*, ketika manusia membuat dirinya mampu menyingkap kenyataan aktif realita sosial sehingga mereka mengetahui dan memahami apa yang sudah diketahuinya (Freire, 1999: 289). Dari dua tahap yang sudah disebutkan diatas itulah yang nantinya akan mengantarkan para subjek pendidikan untuk menjadi manusia yang seutuhnya.

C. Simpulan

Semula Islam melalui praktik kerasulan Muhammad Saw telah melakukan pembebasan terhadap masyarakat yang tertindas secara sistematis. Namun belakangan teologi Islam yang berkembang pada masa pemerintah Bani Umayyah dan seterusnya mengalami penyimpangan dengan hanya membahas masalah ketuhanan dan masalah kehidupan setelah mati, sementara realitas kehidupan di dunia dilupakan, akibatnya kondisi rakyat kecil semakin tertindas dan muncul masalah sosial yang krusial.

Islam dan Masalah Kemanusiaan Perspektif Pendidikan Pembebasan

Teologi pembebasan yang berkembang di negara-negara Islam, seperti digagas oleh Asghar Ali Engineer sejatinya berasal dari Barat seperti digagas oleh Paulo Freire. Gagasan ini memiliki kesamaan, yaitu dalam rangka membebaskan kaum tertindas dari ulah penguasa secara politik dan ekonomi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer, misalnya dengan melakukan revitalisasi teologi Islam kepada ruh yang sejatinya. Tentu saja revitalisasi teologi Islam ini harus dilanjutkan, dan penulis berupaya melakukan lanjutan melalui pendidikan Islam. Dengan harapan akan muncul pendidikan Islam pembebasan, yaitu pendidikan Islam yang berorientasi pada pembebasan masalah-masalah kemanusiaan yang dewasa ini semakin parah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasy, Muhammad Athiyah, 1975, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falalsifatuha*, Mesir, Isa al-Bab al-Pabi wa Syurakah.
- Al-Attas, Syed Muhammad al-Naqueib, 1992, *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah, King Abdul Aziz University.
- Achmadi, 2010, *Ideologi Pendidikan Islam (Paradigma Humanisasi Teosentris)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. 2.
- Al-Nahlawi, Muhammad Abdurrahman, 1979, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha fi al-Bayt wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Azhari, Abu Manshur, 2001, *Tahdzib al-Lughah*, Mesir, Dar Ihya al-Turas al-Araby.
- Al-Jamaly, Muhammad Faadhil, 1967, *Tarbiyah al-Insan al-Jadid*, Tunisia, Al-Syirkah al-Thurnisiyah Littauzi.
- Azra, Azyumardi, 2000, *Pendidikan Islam Tradisidan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, Ciputat, Logos Wacana Ilmu.
- Basri, Faisal, 2010, *Dasar-Dasar Ekonomi Internasional*, Jakarta, Kencana.
- Brubacher, John S., 1978, *Modern Philosophies of Education*, New Delhi, Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.
- Darmaningtyas, 2005, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta, LKiS.
- Engineer, Asghar Ali, 1987, *Islam and Its Relevance to Our Age*, Kuala Lumpur, Ikraq.
- , 1989, *The Muslim Communities of Gujarat*, New Delhi, Ajanta Publications.
- , 2006, *The Rights of Women in Islam*, In A. I. Alwee, and M. I. Taib, *Islam, Religion and Progress: Critical Perspective*, Singapore, The Print Lodge Pte. Ltd.
- , 2007, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Yogyakarta, LKiS, Cet. 7.

Islam dan Masalah Kemanusiaan Perspektif Pendidikan Pembebasan

- , 2009, *Governance and Religion: An Islamic Point of View*, In C. Muzaffar, *Religion and Governance*, Selangor Darul Ehsan, Arah Publications.
- , 2009, *Islam dan Pluralisme*, In D. Effendi, *Islam dan Pluralisme Agama*, Yogyakarta, Interfidei.
- , 2004, *Liberalisasi Teologi Islam*, terj. Rizqon Khamami, Yogyakarta, Alenia.
- Faqih, Mansour dan Toto Rahardjo, et. al., 2001, *Pendidikan Populer Membangun Masyarakat Kritis*, Yogyakarta, Read Books.
- Freire, Paulo, dan Ivan Illich, et. al., 2009, *Menggugat Pendidikan*, terj. Omi Intan Naomi, cet ke-7, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo, 2000, *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , 1995, *Pendidikan Kaum Tertindas*, terj. Utomo Dananjaya, et. al, Jakarta, LP3ES.
- , 1999, *Politik Pendidikan (Kebudayaan, Kekuasaan & Pembebasan)*, terj. Agung Prihantoro, Fuad Arif Fudiyartanto, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , 2005, *Pedagogi Pengharapan (Menghayati Kembali Pedagogi Kaum Tertindas*, cet. ke-5, Yogyakarta, Kanisius.
- , 2006, *Paedagogy Of The Oppressed*, trans. Myra Bergman Ramos, New York, Continuum.
- , 2008, *Pendidikan Sebagai Proses*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hanafi, Hassan, 2007, *Kiri Islam*, dalam Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Posmodernisme, Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*, terj. Imam Aziz dan Jadul Maula, Yogyakarta, LKiS, Cet. 7.
- Henderson, John, 1957, *Penyakit Anak-anak*, Jakarta, Penerbit Keng Po.
- Isma'il, Syekh Ibrahim ibn, 1992, *Syarh Ta'lim al-Muta'llim Tariq al-Ta'allum*, Indonesia, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.

Ah. Choiron

- Kusnadiningrat, E., 1999, *Teologi dan Pembebasan, Gagasan Islam Kiri Hasan Hanafi*, Jakarta, Logos.
- Kuroyanagi, Tetsuko, 2011, *Totto Chan; GadisCilik di Jendela*, cet. ke-9, terj. Widya Kirana, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kneller, George F., 1971, *Introduction to The Philosophy of Education*, New York, John Wiley and Sons, Inc..
- Langgulong, Hasan, 1980, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung, Al-Maarif.
- Lowy, Michael, 1999, *Teologi Pembebasan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mohammad, Baharuddin, dan Makin, 2009, *Pendidikan Humanistik*, Yogyakarta, Ar-Ruz Media.
- Muhaimin, Azzet Akhmad, 2011, *Pendidikan Yang Membebaskan*, Yogyakarta, Ar-Ruz Media.
- Mulyahardjo, Redja, 2006, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, Bandung, CV. Remadja Rosdakarya.
- Mu'arif, 2008, *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, Yogyakarta, Pinus, Cet. 1.
- Nitiprawiro, Francis Wahono, 2008, *Teologi Pembebasan, Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya*, Yogyakarta, LKiS, Cet. 2.
- Simon, Roger, 2011, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. 3.
- Siswoyo, D., dkk., 2007, *Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Stepan, A. C., 2000, Religion, Democracy, and the "Twin Tolerations". *Journal of Democracy*, 11 (4), 37-57.
- Suseno, Frans Magnis, 1999, *Pemikiran Karl Marx dari sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta, Gramedia Utama.
- Suwarno, Wiji, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Tafsir, Ahmad Tafsir, 2007, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet. 1.